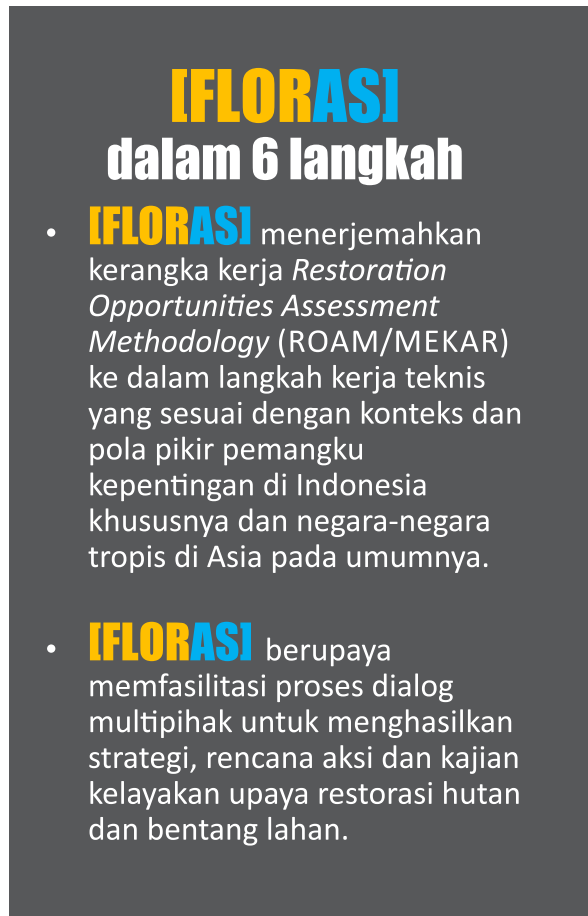


MENILAI POTENSI RESTORASI HUTAN DAN BENTANG LAHAN DAS MUSI, SUMATERA SELATAN

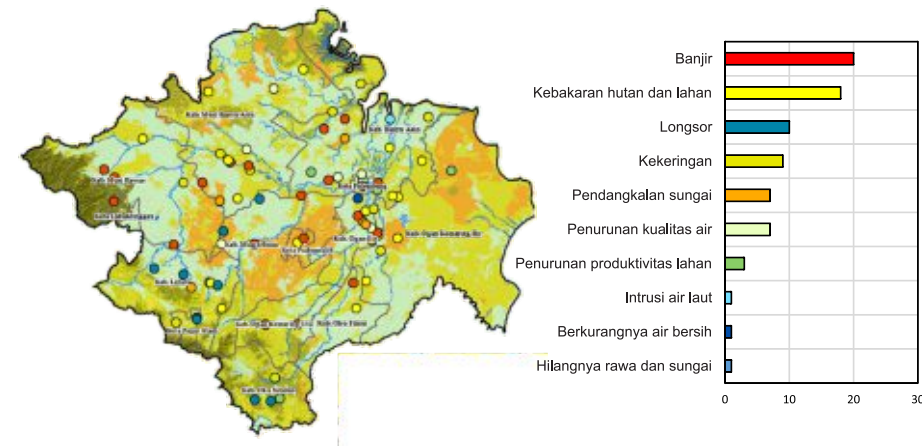
Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi di Sumatera Selatan merupakan salah satu dari 108 DAS Prioritas di Indonesia yang ditetapkan melalui SK Menhut No SK.328/Menhut-II/2009. Tingkat kerusakan dan kekritisitas DAS Musi terindikasi dari luas lahan kritis mencapai 1,7 juta hektar (BPDAS 2014) dan luas tutupan hutan pada tahun 2014 hanya tersisa 14,4% dari luas wilayah DAS Musi. Ditandai oleh timbulnya berbagai permasalahan lingkungan di wilayah DAS Musi, diperlukan usaha-usaha pengelolaan secara terpadu untuk memulihkan fungsi DAS dan meningkatkan kembali kualitas lahan.

Restorasi hutan dan bentang lahan menekankan pada upaya jangka panjang untuk memulihkan fungsi DAS dan kualitas lahan, sekaligus mendukung adanya peningkatan penghidupan bagi masyarakat. Strategi dan rencana implementasi restorasi hutan dan bentang lahan harus mengakomodasi berbagai kepentingan lintas sektor pembangunan dan menyesuaikan dengan kondisi aktual DAS. Pembuatan strategi dan rencana restorasi dilaksanakan melalui penilaian potensi restorasi hutan dan bentang lahan yang dilaksanakan secara inklusif, integratif serta berdasarkan data dan informasi yang shahih.

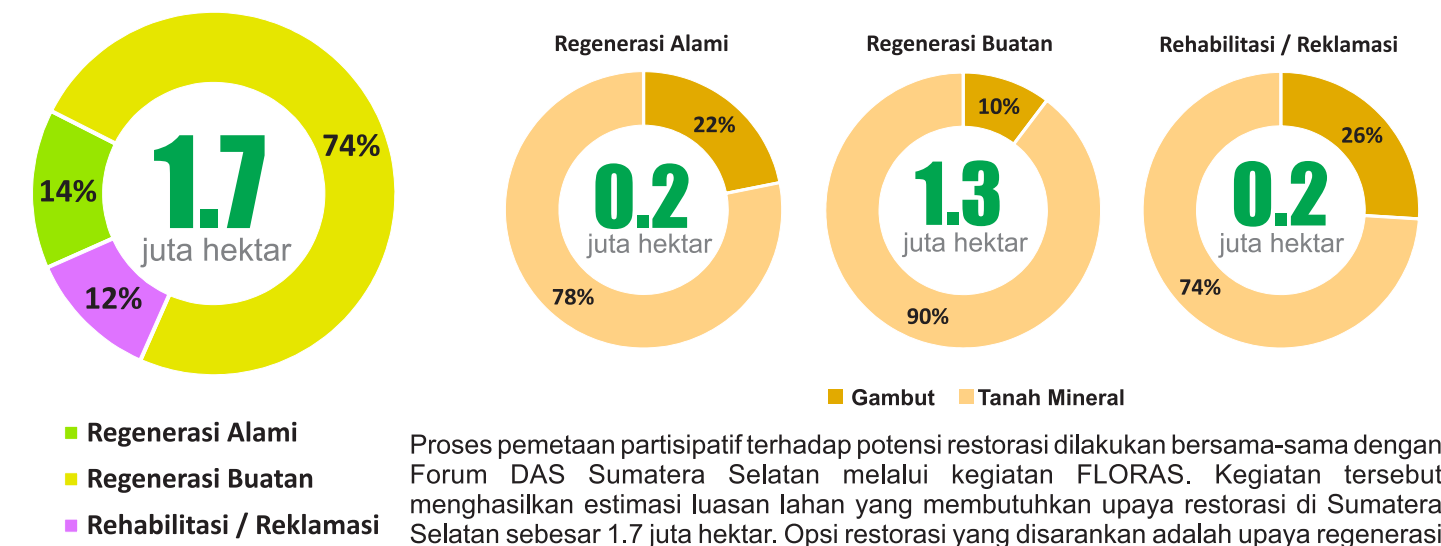


Motivasi Restorasi



Restorasi hutan dan bentang lahan di DAS Musi bertujuan untuk memulihkan fungsi DAS Musi dengan cara mencegah kebakaran lahan dan memulihkan areal bekas terbakar, meningkatkan tegakan pohon dan memperbaiki tutupan lahan di daerah hulu guna mencegah banjir, serta meningkatkan daerah resapan air di hilir untuk mencegah hilangnya rawa dan sumber air.

Potensi Restorasi DAS Musi



Opsi dan Mitra Restorasi

Regenerasi Alami	Regenerasi Buatan	Rehabilitasi/Reklamasi																														
Pemulihan fungsi hutan dan ekosistem alami menggunakan bibit tanaman asli yang bersumber dari lokasi setempat, dengan atau tanpa teknik silvikultur untuk mempercepat pemulihan fungsi lahan tersebut. <table border="1"><thead><tr><th>Role</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pengelola Perkebunan</td><td>74%</td></tr><tr><td>Pengelola HPH</td><td>14%</td></tr><tr><td>Pengelola HTI</td><td>8%</td></tr><tr><td>Pengelola Lahan Lainnya</td><td>4%</td></tr></tbody></table>	Role	Percentage	Pengelola Perkebunan	74%	Pengelola HPH	14%	Pengelola HTI	8%	Pengelola Lahan Lainnya	4%	Penanaman kembali lahan berhutan atau ekosistem alami melalui perkayaan spesies asli maupun komersil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesuburan tanah, dan memperbaiki <table border="1"><thead><tr><th>Role</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pengelola Perkebunan</td><td>41%</td></tr><tr><td>Pengelola HPH</td><td>23%</td></tr><tr><td>Pengelola HTI</td><td>34%</td></tr><tr><td>Pengelola Lahan Lainnya</td><td>2%</td></tr></tbody></table>	Role	Percentage	Pengelola Perkebunan	41%	Pengelola HPH	23%	Pengelola HTI	34%	Pengelola Lahan Lainnya	2%	Penanaman kembali lahan kosong/terbuka pada areal-areal yang hanya memiliki daya dukung minimum untuk tanaman dapat tumbuh maupun pada areal-areal yang telah terdegradasi berat/terpolusi oleh limbah. <table border="1"><thead><tr><th>Role</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pengelola Perkebunan</td><td>58%</td></tr><tr><td>Pengelola HPH</td><td>33%</td></tr><tr><td>Pengelola HTI</td><td>5%</td></tr><tr><td>Pengelola Lahan Lainnya</td><td>4%</td></tr></tbody></table>	Role	Percentage	Pengelola Perkebunan	58%	Pengelola HPH	33%	Pengelola HTI	5%	Pengelola Lahan Lainnya	4%
Role	Percentage																															
Pengelola Perkebunan	74%																															
Pengelola HPH	14%																															
Pengelola HTI	8%																															
Pengelola Lahan Lainnya	4%																															
Role	Percentage																															
Pengelola Perkebunan	41%																															
Pengelola HPH	23%																															
Pengelola HTI	34%																															
Pengelola Lahan Lainnya	2%																															
Role	Percentage																															
Pengelola Perkebunan	58%																															
Pengelola HPH	33%																															
Pengelola HTI	5%																															
Pengelola Lahan Lainnya	4%																															
Regenerasi alami di wilayah DAS Musi sebagian besar terletak di kawasan konservasi dan hutan produksi terbatas (HPT). Rentan terhadap gangguan aktivitas manusia, opsi restorasi ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat guna menjaga dan mempertahankan keberlangsungan suksesi alami di lahan yang direstorasi.	Perkayaan spesies di wilayah DAS Musi sebagian besar tersebar di kawasan hutan produksi tetap (HP) dan areal penggunaan lain (APL). Kebutuhan terhadap suplai bibit tanaman, tenaga kerja, dan penguasaan teknik budidaya, memungkinkan opsi restorasi ini untuk dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan dengan pengelola lahan HPH, HTI, dan perkebunan, serta pemilik lahan masyarakat.	Rehabilitasi/reklamasi lahan di wilayah DAS Musi sebagian besar terletak di kawasan hutan produksi tetap (HP) dan hutan lindung (HL). Penggunaan teknologi pengolahan tanah intensif dan bibit yang adaptif pada lahan terdegradasi berat, opsi restorasi ini memerlukan dukungan tenaga kerja, waktu dan biaya yang cukup besar dengan pola-pola kemitraan dengan pengelola lahan maupun masyarakat sekitar.																														

Informasi lebih lengkap silahkan menghubungi:
Andree Ekadinata (a.ekadinata@cgaia.org)
Program, Indonesia Country Office,
JI. CIFOR, Siliwangi, Bogor 16115

World Agroforestry Centre (ICRAF) adalah lembaga penelitian internasional yang berpusat di Nairobi – Kenya, dibentuk tahun 1978 dengan nama the International Centre for Research in Agroforestry atau disingkat ICRAF. Saat ini ICRAF mempunyai satu dari 15 lembaga penelitian konsultatif yang tergabung dalam jaringan the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). ICRAF mengembangkan agroforestri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dipraktikkan petani. Melalui kegiatan penelitian dan kerjasama yang inovatif dengan berbagai mitra, kami mempromosikan ilmu pengetahuan bagi petani dan membuat kebijakan.

SONYA DEWI | Country Coordinator,
ICRAF Indonesia

Kutipan yang disarankan:

Ekadinata A, Wijaya C, Yunardi S, Aksomo H, Joni dan Dewi S, 2017. Menilai Potensi Restorasi Hutan dan Bentang Lahan DAS Musi, Sumatera Selatan, Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre, Southeast Asia Regional program

NIRARTA SAMADHI | Director,
WRI Indonesia

World Resources Institute (WRI)
Indonesia didirikan pada akhir 2014 dengan kantor pusat di Jakarta, WRI Indonesia berafiliasi dengan World Resources Institute, lembaga kajian lingkungan global berbasis di Washington D.C. WRI memiliki jaringan penelitian yang beranggotakan lebih dari 450 tenaga ahli dan staf di lebih dari 50 negara, dengan kantor di Tiongkok, India, Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Bersama dengan mitra-mitra kami selama lebih dari 20 tahun, dan WRI Indonesia didirikan untuk membangun keberadaan dalam negeri yang kuat, membangun formal kemitraan yang telah terbentuk, serta memperkuat penelitian lapangan kami.

SYAFRUL YUNARDY | Ketua,
Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Sumatera Selatan

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Sumatera Selatan (Forum DAS Sumse) adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggaraan pengelolaan DAS yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan. Forum bertujuan memberikan arahan yang efektif sebagai bagian dari pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan DAS dari Hulu ke Hilir secara uluh. Sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis di bidang pengelolaan DAS, Forum DAS SumseI antara lain bertugas mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di tingkat Provinsi dan membantu Gubernur dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS, Pembiayaan dan Pembedayaan Masyarakat serta pengendalian pengelolaan DAS di Sumatera Selatan

PETA POTENSI RESTORASI DAS MUSI SUMATERA SELATAN

- Regenerasi alami
- Regenerasi buatan
- Rehabilitasi/reklamasi



Taman Nasional Kerinci Seblat

Tidak kurang dari 15 ribu hektar zona penyangga di kawasan Taman Nasional (TN) Kerinci Seblat telah beralih fungsi menjadi kebun campur dan kebun monokultur. Agar pemulihan fungsi kawasan melalui regenerasi alami dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi kompleksitas permasalahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan ini.



KPHP Lakitan

Sekitar 40 ribu hektar lahan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lakitan telah beralih fungsi menjadi kebun monokultur. Untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan produksi, diperlukan upaya restorasi melalui pengayaan spesies tanaman kehutanan dengan pola kemitraan bersama masyarakat maupun perusahaan pengusahaan hutan.



Taman Nasional Sembilang

Degradasi hutan di wilayah Taman Nasional (TN) Sembilang telah mengakibatkan degradasi fungsi ekosistem lahan basah di pesisir barat Provinsi Sumatera Selatan. Upaya regenerasi alami pada areal hutan bekas tebangan di kawasan konservasi ini dapat diupayakan oleh pemerintah pusat, diantaranya melalui penataan batas taman nasional dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan bekerjasama dengan pemerintah daerah.



KPHL Banyuasin

Areal hutan lindung di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Banyuasin banyak yang telah beralih fungsi menjadi semak belukar, kebun campur, dan kebun monokultur. Upaya restorasi perlu dilakukan melalui program-program rehabilitasi/ reklamasi lahan untuk mengembalikan fungsi lindung di kawasan ini.



Suaka Margasatwa Padang Sugihan

Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan yang merupakan habitat alami gajah sumatera (*Elephas maximus-sumatranus*) telah mengalami degradasi lahan yang cukup signifikan. Tidak kurang dari 70 ribu hektar lahan di kawasan konservasi ini terdegradasi menjadi hutan sekunder bekas tebangan. Regenerasi alami dapat diupayakan dengan teknik silvikultur terbatas untuk mempercepat pemulihan fungsi kawasan.



Kawasan Hutan Lindung

Sekitar 60 ribu hektar kawasan hutan lindung yang berada di daerah hulu DAS Musi ini telah beralih fungsi menjadi kebun monokultur. Terbantang di 6 kabupaten di Sumatera Selatan dan dikelilingi kawasan areal penggunaan lain, upaya restorasi melalui perkayaan spesies maupun rehabilitasi/reklamasi lahan memerlukan koordinasi yang baik di tingkat provinsi, dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.



Kawasan Hutan Produksi Yang Dibebani Izin

Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu perlu mengupayakan penanaman (pengayaan spesies) tanaman kehutanan pada areal bekas tebangan dan areal lindung yang terdegradasi guna memulihkan fungsi kawasan hutan produksi dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.

